

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 291 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pangalengan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pangalengan untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN PANGALENGAN

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Pangalengan merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangalengan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pangalengan yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Pangalengan bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Pangalengan dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Pangalengan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Pangalengan;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Pangalengan.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN PANGALENGAN

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Pangalengan dalam menyusun Renja Kecamatan Pangalengan.

(2) Renstra Kecamatan Pangalengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pangalengan paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Pangalengan; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pangalengan.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Pangalengan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Pangalengan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Pangalengan; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Pangalengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN PANGALENGAN

Pasal 5

(1) Kecamatan Pangalengan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangalengan dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Pangalengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Pangalengan terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Pangalengan.
(3) Camat Pangalengan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Pangalengan.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PANGALENGAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Pangalengan, maka Renstra Kecamatan Pangalengan dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangalengan terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Pangalengan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 291

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 291 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR .... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tugas pokok perangkat daerah Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, kecamatan dituntut untuk mampu merespons kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra juga menjabarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang terukur sebagai tolok ukur capaian pelaksanaan pembangunan.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selaras dengan sistem perencanaan nasional dan daerah, dokumen Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya:

a. Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program pembangunan dari visi dan misi Bupati terpilih.
b. Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan setiap tahunnya selama kurun waktu 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setiap program dan kegiatan kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memastikan tercapainya tujuan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Kabupaten

Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 Adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Pangalengan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah

b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);
c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pangalengan;
d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029 di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara singkat Latar belakang pembuatan Renstra Kecamatan Pangalengan , Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangalengan, keterkaitan Renstra Kecamatan Pangalengan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan penjelasan tentang, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pangalengan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Pangalengan

Memuat penjelasan tentang gambaran kedudukan Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan, tugas pokok dan fungsi aparatur Kecamatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Pangalengan

Memuat penjelasan ringkas tentang Sumber daya yang ada di Kecamatan Pangalengan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaranan Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Menjelaskan secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Pangalengan berdasarkan target Renstra Kecamatan Pangalengan periode sebelumnya.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Memuat secara umum tentang kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pangalengan.

2.1.5. Mitra Kecamatan Pangalengan dalam Pemberian Pelayanan

Menguraikan Mitra yang bekerja sama dengan Kecamatan Pangalengan dalam Pemberian Pelayanan.

2.2. Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan Pangalengan

2.2.1. Penelahaan RPJMN 2025-2029

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Memuat telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kecamatan Pangalengan Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan isu-isu strategis.

2.2.3. Penelaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan

2.2.6. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Kecamatan Pangalengan 2025-2029

Memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan periode dalam lima tahun mendatang.

3.2. Strategi Kecamatan Pangalengan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029

Memuat Strategi Kecamatan Pangalengan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan

3.3. Pangalengan dalam lima tahun mendatang.

Arah Kebijakan Kecamatan Pangalengan dalam

mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, SubKegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif yang akan digunakan pada Renstra dalam lima tahun mendatang

4.2. Uraian SubKegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat SubKegiatan yang ada pada Renstra dalam lima tahun mendatang dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah

Memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah.

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

Memuat tentang target kinerja penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah lima tahun mendatang melalui indikator kinerja kunci (IKK)

4.5. Inovasi Kecamatan Pangalengan memuat tentang berbagai upaya kreatif dan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGALENGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Kecamatan Pangalengan sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangalengan menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Gambaran ini tidak hanya berfungsi sebagai potret kinerja pelayanan saat ini, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Pangalengan diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pangalengan

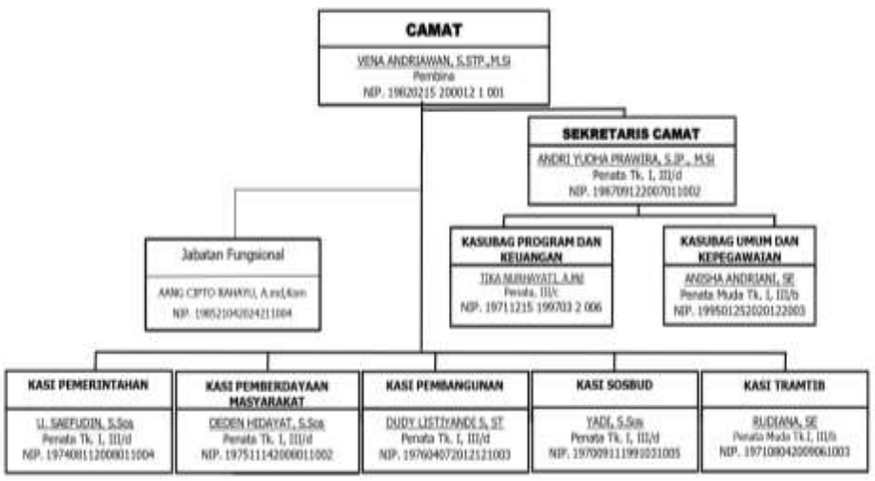
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
    1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

e. Seksi Pembangunan;
f. Seksi Sosial Budaya;
g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
h. Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pangalengan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Sturuktur Organisasi Kecamatan Pangalengan



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

a. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

1. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan

b. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
6. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f) Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;

g) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan;
h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b) pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c) pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

c. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. elaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

f. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;

3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

g. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pangalengan

Kecamatan Pangalengan memiliki sumber daya yang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, pangkat/ golongan, tingkat Pendidikan, jenis pendidikan yang di ikuti baik Pendidikan formal dan non formal serta penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangalengan. Berikut ini sumber daya yang dimaksud berdasarkan inventarisasi per Bulan Agustus 2025:

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Pangalengan berjumlah 19 orang, terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat struktural, 8 (Delapan) orang staf pelaksana, dan 2 (dua) orang tenaga PPPK, Selain itu terdapat pula 7 orang tenaga Non PNS. Adapun Susunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Pangalengan adalah sebagai berikut:

Kondisi Pegawai di Kecamatan Pangalengan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Data Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1.	Laki – laki	15	1	3	19
2.	Perempuan	2	1	4	7
3.	Jumlah	17	2	7	26

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pangalengan Agustus 2025

Tabel 2.2
Data Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	
1.	Gol IV	1	-		1
2.	Gol III	10	1		11
3.	Gol II	5	-	2	7
4.	Gol I		-		
	Jumlah	16	1	2	19

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pangalengan Agustus 2025

Tabel 2.3
Data Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan: Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian				L/P		Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	PHL	P	L	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	1	-	1	2
3.	SLTA	5	-	1	3	3	5	17
4.	D3	2	-	1	1	2	2	8
5.	S1	9	1	-	2	2	9	23
6.	S2	2	-	-	-	-	2	4
	Jumlah	18	1	2	7	7	19	54

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pangalengan Agustus 2025

Tabel 2.4
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pangalengan yang telah mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon

No.	Esselon	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim	L/P	
				L	P
1.	III a	1	Diklatpim TK. III	1	
2.	IV b	2	Diklatpim TK. IV	1	1
3.	IV a	5	Diklatpim TK. IV	5	
	Jumlah	8 orang			

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pangalengan Agustus 2025

b. Sumber Daya Aset/BMD

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pangalengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Berita Acara Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 25 Agustus 2025 Kecamatan Pangalengan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Neraca Aset Periode Agustus Tahun 2025 Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 25 AGUSTUS 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 25 AGUSTUS 2025	NILAI BUKU PER 25 AGUSTUS 2025
1	Tanah	1.824.216.000	-	1.824.216.000
2	Peralatan dan Mesin	1.266.688.926	1.151.121.959	115.566.967
3	Gedung dan Bangunan	1.792.438.070	591.171.074	1.201.266.997
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-`	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Total Aset Tetap	4.883.342.996	1.742.293.033	3.141.049.964
7	Aset Tak Berwujud	-	-	-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	112.936.208	112.104.542	831.666
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-	-	-
	Total Aset Lainnya	112.936.208	112.104.542	831.666
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	4.996.279.204	1.854.397.575	3.141.881.630

Sumber: BMD Kecamatan Pangalengan Agustus 2025

Untuk 5 tahun kedepan dengan rencana strategis yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada pengadaan aset dan

pemeliharaan diarahkan pada modernisasi alat kerja/penunjang Kerja (*Hardware, sofware*). Dan Pengadaan/pemeliharaan gedung dengan memperhatikan estetika, dan harus representatif dengan segala penunjang atau pendukungnya sesuai ketentuan pada layanan publik.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kecamatan Pangalengan sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu, penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan merupakan langkah strategis dalam menilai sejauh mana tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat tercapai sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pangalengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta menjadi pijakan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pangalengan

Kecamatan Pangalengan merupakan sebuah wilayah di Kabupaten Bandung dengan memiliki luas ± 27.294.771 Ha. Kecamatan Pangalengan adalah salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di wilayah kabupaten bandung yang terdiri dari 13 Desa, 51 Dusun, 231 RW, dan 231 RT, secara topografis merupakan daerah relatif tinggi yang memiliki ketinggian antara 1.524 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata -rata 1.996 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 19◦C s.d 20◦C.

Adapun peta wilayah Kecamatan Pangalengan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Pangalengan



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pangalengan,2025.

dengan batas-batas wilayah:

-Sebelah Utara: Kecamatan Cimaung

-Sebelah Selatan : Kecamatan Garut

-Sebelah Timur: Kecamatan Kertasari

-Sebelah Barat: Kecamatan Pasir jambu

Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Pangalengan sebagai perangkat Daerah meliputi 13 (tiga belas) Desa yang terdiri dari:

1.Desa Lamajang

2.Desa Tribaktimulya

3.Desa Margamulya

4.Desa Pangalengan

5.Desa Margamukti

6.Desa Margamekar

7.Desa Banjarsari

8.Desa Wanasuka

9.Desa Sukaluyu

10.Desa Margaluyu

11.Desa Warnasari

12.Desa Pulosari

13.Desa Sukamanah

Berdasarkan kondisi demografinya, Kecamatan Pangalengan termasuk wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Kabupaten Bandung. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Pangalengan relatif stabil dari tahun ke tahun, dengan angka rata-rata sekitar 1,02% per tahun pada periode 2020–2023. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh faktor alami (kelahiran) serta migrasi masuk, khususnya karena daya tarik sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berkembang di wilayah Pangalengan.

Jumlah penduduk Kecamatan Pangalengan mencapai sekitar 155.000 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak ±78.00 jiwa dan perempuan sebanyak ±77.00 jiwa. Struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) dengan proporsi lebih dari 66% dari total populasi, sehingga menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Secara etnis, mayoritas penduduk Kecamatan Pangalengan merupakan suku Sunda dengan budaya lokal yang masih kental. Kehidupan sosial masyarakat ditandai dengan kuatnya nilai gotong royong, tradisi keagamaan, serta solidaritas komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberadaan kelompok pemuda, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kecamatan Pangalengan memiliki berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup memadai untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Di bidang kesehatan, terdapat 3 unit puskesmas (Puskesmas Pangalengan, Puskesmas Warnasari, dan Puskesmas Sukamanah), puskesmas pembantu yang tersebar di hampir setiap desa, serta lebih dari 233 posyandu yang aktif melayani masyarakat di tingkat dusun. Selain itu, terdapat fasilitas kesehatan swasta berupa klinik, bidan praktik mandiri, serta rumah bersalin yang melengkapi layanan kesehatan dasar masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Pangalengan didukung oleh fasilitas PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA yang tersebar di hampir seluruh desa. Keberadaan sekolah kejuruan (SMK)

yang relevan dengan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi modal penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal.

Dalam 5 tahun ke depan Kecamatan Pangalengan mempunyai beragam Potensi untuk dikembangkan, baik dari aspek geografis, sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Secara geografis, Kecamatan Pangalengan berada di wilayah Bandung Selatan dengan topografi pegunungan, iklim sejuk, serta panorama alam yang indah. Kondisi ini menjadikan Pangalengan memiliki posisi penting sebagai sentra pertanian, perkebunan, pariwisata, serta pengembangan energi terbarukan.

Dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), Kecamatan Pangalengan memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas dengan komoditas unggulan berupa teh, kopi, kentang, sayuran hortikultura, serta susu sapi perah. Ketersediaan sumber daya air yang melimpah dari danau, sungai, serta waduk (seperti Situ Cileunca) mendukung kegiatan pertanian, perikanan, irigasi, maupun pariwisata. Selain itu, Pangalengan juga memiliki potensi energi terbarukan, seperti panas bumi (geothermal) dan mikrohidro, yang dapat menunjang kemandirian energi sekaligus mendukung program pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi dan UMKM, Kecamatan Pangalengan ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai basis utama perekonomian masyarakat. Seiring berkembangnya agrowisata dan ekowisata, muncul pula berbagai unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang kuliner, olahan susu, kerajinan, hingga produk kreatif lokal. Kehadiran generasi muda dengan kemampuan digital turut mendorong berkembangnya pemasaran berbasis teknologi, sehingga peluang penguatan ekonomi masyarakat semakin terbuka luas.

Dalam bidang pariwisata, Pangalengan memiliki daya tarik yang sudah dikenal luas, seperti perkebunan teh Malabar, Situ Cileunca, wisata peternakan, camping ground, hingga wisata petualangan berbasis alam. Selain itu, potensi ekowisata dan desa wisata mulai dikembangkan, dengan menawarkan keunikan lanskap alam, budaya Sunda, serta produk lokal masyarakat. Hal ini berpotensi memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek infrastruktur, Kecamatan Pangalengan didukung oleh aksesibilitas jalan yang semakin membaik meskipun masih diperlukan

peningkatan konektivitas antar desa. Infrastruktur dasar masyarakat juga relatif memadai dengan dukungan jaringan listrik, telekomunikasi, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pelayanan publik ditopang oleh keberadaan gedung kantor kecamatan yang representatif, fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan klinik swasta. Selain itu, keberadaan unsur keamanan dan ketertiban juga mendukung stabilitas wilayah dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Pangalengan dikenal memiliki etos kerja tinggi, semangat gotong royong, serta adaptif terhadap perubahan. Kearifan lokal dan budaya Sunda yang masih kuat menjadi identitas daerah sekaligus daya tarik wisata budaya. Seni pertunjukan tradisional, musik, serta kerajinan tangan lokal merupakan aset yang dapat dikembangkan dalam memperkuat karakter daerah dan membuka peluang ekonomi kreatif. Kondisi sosial masyarakat juga diperkuat dengan peran aktif organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, kelompok pemuda, serta komunitas yang berperan penting dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan lingkungan.

Secara keseluruhan, potensi Kecamatan Pangalengan mencerminkan peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, energi, hingga ekonomi kreatif. Perencanaan pembangunan yang tepat dan dukungan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangalengan.

Kedudukan Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat:
   a. Pembinaan terhadap anggota Satgas Linmas yang berada di Desa;
   b. Pembinaan siskamling di tingkat Desa, Dusun atau Lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
   c. Patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktifitas masyarakat dalam bersiskamling;

d. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait;
e. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan Instansi terkait;
f. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa sebagai dasar atau payung Hukum di tingkat Desa;
g. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
h. Melaksanakankegiatanlainnyasepertiperayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnafal umum, Pam Lebaran;
i. Melaksanakan PPKM di Wilayah Kecamatan Pangalengan, untuk mencegah peningkatan penyebaran Covid-19.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
b. Pembinaan dan pembenahan Administrasi pelayanan di kecamatan dan Desa
c. Pembinaan terhadap Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin
d. Memberikan kesempatan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, Pendidikan dan kursus baik yang di laksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
e. Pembinaan kelengkapan Administrasi Desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes, dan susunan Administasi dan tata laksana pemerintahan Desa;
f. Mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;
g. Memberikan sosialisasi bagi perangkat Desa dan Kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan;

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan:
a. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat;
b. Memfasilitasi, membina dan membantu kegiatan revitalitas pertanian;
c. Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

d. Memfasilitasi, pembinaan dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
e. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;
f. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengusunan rencana strategis review kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan:

a. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan;
b. Memfasilitasi,membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
c. Memfasilitasi dan memonitoring pengelolaan tempat pengolah sampah;
d. Pembinaan,koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
f. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendanaan Keluarga Sejahtera.
g. Pembinaan,koordinasi dan harmonisasilembaga-lembaga keagamaan;
h. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
i. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;
j. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berncana;
k. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenaga kerjaan dan kemasyarakatan;
l. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Selain itu Pelaksanaan Tugas Pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam Bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 Tentang Pelimphaan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, adapun Rincian Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah antara lain:

Jenis Kewenangan yang dilimpahkan Kepada Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tabel Kewenangan yang dilimpahkan Kepada Kecamatan

Urusan	Jenis Kewenangan yang Dillimpahkan
Pendidikan	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan 2. Monitoring dan Fasilitasi Kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah Kecamatan
Kesehatan	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan 4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di Wilayah Kecamatan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Sosial	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan 8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Pertanahan	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Lingkungan Hidup	10. Pengelolaan sampah skala Kecamatan 11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Skala Kecamatan 12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan 13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14. Monitoring dan Fasilitasi Penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil

Urusan	Jenis Kewenangan yang Dillimpahkan
Pemberdayaan masyarakat dan desa	15. Peresmian anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Peresmian pemberhentian anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Memandu pengucapan serta penandatanganan berita acara sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa, Evaluasi Rancangan peraturan desa, Klarifikasi Peraturan Desa
Komunikasi dan Informatika	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM Skala Kecamatan 18. Promosi produk unggulan UMKM skala Kecamatan
Penanaman Modal	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) 20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah Kecamatan
Kepemudaan dan Olahraga	21. Pembinaan Keolahragaan tingkat kecamatan 22. Pembinaan Kepemudaan tingkat Kecamatan
Kebudayaan	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan 24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat Kecamatan
Pariwisata	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata 26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata 27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
Pertanian	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang mantap dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, Kecamatan Pangalengan selama periode 2021– 2025 telah menghadirkan inovasi unggulan, yakni RAKUNDES 2.0 – PATENGAN SMILE (Rabu Kunjung Desa) – (Pentahelix Pangalengan untuk *Stunting*, Miskin, dan Lestarikan Lingkungan)

Pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, di wilayah Kecamatan Pangalengan masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus segera ditangani, terutama terkait tingginya angka *stunting*, kondisi kemiskinan yang signifikan, serta persoalan pelestarian lingkunagn. Ketiga isu tersebut saling terkait dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat, sehingga membutuhkan langkah strategis dan kolaboratif untuk menyelesaikannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pangalengan mengembangkan inovasi RAKUNDES 2.0 (Rabu Kunjung Desa) sebagai sebuah platform pelayanan publik yang mengedepankan pendekatan kedekatan, kolaborasi, dan partisipasi. Melalui kegiatan kunjungan rutin setiap hari Rabu, jajaran Pemerintah Kecamatan bersama perangkat desa dapat melakukan monitoring langsung, mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan pendampingan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi desa.

Supaya inovasi ini lebih berdampak, RAKUNDES 2.0 diintegrasikan dengan tema PATENGAN SMILE (Pentahelix Pangalengan untuk *Stunting*, Miskin, dan Lestarikan Lingkungan). Pendekatan pentahelix — melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media — dipandang tepat untuk menciptakan sinergi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa. Sinergi ini menjadikan RAKUNDES 2.0 tidak hanya sebagai forum komunikasi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi nyata untuk mengatasi masalah *stunting*, kemiskinan, dan kelestarian lingkungan.

Melalui integrasi RAKUNDES 2.0 – PATENGAN SMILE, diharapkan terwujud:

1. Penurunan *stunting* melalui penguatan layanan posyandu, edukasi gizi keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara lebih intensif.
2. Pengentasan kemiskinan dengan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, fasilitasi akses usaha mikro, serta pengembangan potensi lokal.
3. Terjaganya dan Terpeliharanya Kelestarian Lingkungan yang Sehat dengan cara Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Penanaman Pohon Kembali.
4. Kolaborasi multipihak yang memastikan setiap intervensi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Secara Strategis Inovasi RAKUNDES 2.0 dengan tema PATENGAN SMS selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, khususnya penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan. Dengan pendekatan kedekatan melalui kunjungan desa dan kolaborasi multipihak melalui pentahelix, Kecamatan Pangalengan berupaya membangun model inovasi pelayanan publik yang partisipatif, inklusif, dan dapat direplikasi di wilayah lain.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pangalengan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator sasaran strategis. Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2024.

Tabel 2.7 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026								
			2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	63.00	63.00	100%	68,50	75,30	109,93	75,30	77,50	102,92
		Persentase BMD dalam kondisi baik	94.00	94.00	100%	64,10	93,26	145,49	96,00	97,73	101,80
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Nilai IKM (*IKU)	83 Point	83 Point	100%	83,10	83,10	100,00	84,00	84,89	101,06
	Kelola Pemerintahan Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang (*IKU)	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00

sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pangalengan yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pangalengan Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Pangalengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025– 2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026					Realisasi Capaian Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2026			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (AKIP)	62	75.30	75.50	75.80	76	63	75.30	77.50	0%	101.61	100%	100%	0%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	0%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	0%	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	8 dokumen	5 Laporan	5 Laporan	0%	100%	100%	100%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	21/12 bulan	22/12 bulan	22/12 bulan	22/12 bulan	12 bulan	21/12 bulan	22/12 bulan	0%	100%	100%	100%	0%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026					Realisasi Capaian Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2026			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 Laporan	1 laporan	1 laporan	0%	0%	100%	100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	22 Paket	22 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0%	0%	0%	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0 orang	50 Orang	50 Orang	0%	0%	100%	100%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	6 paket	6 paket	3 paket	3 paket	15 Jenis	6 paket	6 paket	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Jenis	10 paket	10 paket	12 paket	12 paket	35 Jenis	10 paket	10 paket	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	4 paket	4 paket	12 paket	12 paket	0 Paket	4 paket	4 paket	0%	0%	100%	100%	0%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	10 jenis	5 paket	5 paket	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	100%	100%	100%	0%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026					Realisasi Capaian Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2026			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178 ok	178 ok	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	178 ok	178 ok	12 Laporan	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 bulan	12 Laporan	0%	100%	100%	100%	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	93.00	93.26	93.50	93.75	94.00	93.00	93.26	97.73	0%	100%	100%	104%	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	0 unit	0 unit	5 unit	5 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	5 unit	5 unit	0 unit	0 unit	0 unit	5 unit	5 unit	0%	0%	100%	100%	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	0 unit	6 unit	6 unit	0%	0%	100%	100%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Gedung	0 unit	0 unit	2 Gedung	2 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026					Realisasi Capaian Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2026			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	0%	0%	100%	100%	0%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	82%	83.54%	84%	84.10%	84.20%	82%	83.54%	84.89%	0%	100%	100%	106%	0%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	100%	100%	100%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	250 ok	2 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	250 ok	2 laporan	3 laporan	0%	100%	100%	100%	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	0 Laporan	1 laporan	1 laporan	0%	0%	100%	100%	0%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026					Realisasi Capaian Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2026			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga kemsyarakatan	1 lembaga kemsyarakatan	1 lembaga kemsyarakatan	1 lembaga kemsyarakatan	1 lembaga kemsyarakatan	1 lembaga kemsyarakatan	1 lembaga kemsyarakatan	1 lembaga kemsyarakatan	0%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 laporan	0%	0%	0%	100%	0%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	0 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 laporan	0%	0%	0%	100%	0%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang terfasilitasi	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026					Realisasi Capaian Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2026			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0%	100%	100%	100%	0%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50 ok	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50 ok	1 laporan	1 laporan	0%	100%	100%	100%	0%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0 keg	2 keg	0 keg	0 keg	0%	100%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026					Realisasi Capaian Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2026			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Org	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0 Org	50 Orang	50 Orang	0%	0%	100%	100%	0%
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	200 orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0%	100%	100%	100%	0%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	0%	100%	100%	0%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	13 laporan	1 dokumen	1 dokumen	0%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	0%	100%	0%	0%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	245 Prog	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	245 Prog	1 dokumen	1 dokumen	0%	100%	100%	100%	0%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,082,915,000.00	4,769,013,124.00	5,350,129,202.00	5,306,075,522.00	5,059,247,000.00	4,062,752,040.00	4,685,570,096.00	4,942,060,522.00	2,321,867,276.00	79.93	98.25	92.37	43.76	0.13%	-8.05%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,000,000.00	57,166,000.00	59,827,000.00	40,802,000.00	48,600,000.00	61,394,900.00	43,410,000.00	46,675,000.00	8,975,000.00	94.45	75.94	78.02	22.00	-5.02%	-25.64%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	2,900,000.00	5,650,000.00	2,000,000.00	3,400,000.00	0.00	2,900,000.00	5,610,000.00	525,000.00	0.00	100.00	99.29	26.25	25.06%	0.70%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0.00	2,000,000.00	5,500,000.00	2,550,000.00	3,400,000.00	0.00	2,000,000.00	5,440,000.00	0.00	0.00	100.00	98.91	0.00	38.67%	18.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	9.89	0.00	-25.00%	-25.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0.00	2,160,000.00	5,500,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	2,160,000.00	540,000.00	0.00	0.00	100.00	9.82	0.00	13.66%	-43.75%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65,000,000.00	50,106,000.00	37,677,000.00	29,702,000.00	35,000,000.00	61,394,900.00	36,350,000.00	33,185,000.00	10,760,000.00	94.45	72.55	88.08	36.23	-12.76%	-29.27%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.75%	0.00%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.75%	0.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,534,656,000.00	4,185,426,189.00	4,478,486,002.00	4,643,257,106.00	4,401,360,000.00	4,001,357,140.00	4,091,243,730.00	4,121,756,725.00	2,172,040,876.00	88.24	97.75	92.03	46.78	-0.56%	-11.08%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,534,656,000.00	4,185,426,189.00	4,478,486,002.00	4,643,257,106.00	4,397,960,000.00	4,001,357,140.00	4,091,243,730.00	4,121,756,725.00	2,172,040,876.00	88.24	97.75	92.03	46.78	-0.58%	-11.08%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0.00	0.00	6,500,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	6,460,000.00	525,000.00	0.00	0.00	99.38	35.00	-15.90%	-22.97%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0.00	0.00	6,500,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	6,460,000.00	525,000.00	0.00	0.00	99.38	35.00	-15.90%	-22.97%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	9,369,000.00	46,366,000.00	28,500,000.00	15,000,000.00	0.00	7,569,000.00	46,267,000.00	18,386,600.00	0.00	80.79	99.79	64.51	77.25%	112.75%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	97.50	-25.00%	0.00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	9,369,000.00	46,366,000.00	16,500,000.00	15,000,000.00	0.00	7,569,000.00	46,267,000.00	6,686,600.00	0.00	80.79	99.79	40.52	80.35%	106.43%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,332,000.00	104,038,587.00	135,763,904.00	124,388,100.00	85,000,000.00	102,844,950.00	148,278,653.00	134,118,222.00	61,091,938.00	86.18	142.52	98.79	49.11	-5.59%	-4.96%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,668,800.00	0.00	100.00	100.00	91.72	0.00	0.00%	-27.07%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,602,000.00	26,207,803.00	76,068,804.00	69,388,100.00	25,000,000.00	55,866,519.00	26,173,512.00	76,068,500.00	45,133,950.00	79.13	99.87	100.00	65.05	13.65%	24.20%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,280,000.00	49,978,000.00	4,664,400.00	2,000,000.00	85.60	999.56	93.29	40.00	0.00%	229.98%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,000,000.00	5,510,784.00	12,816,522.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,738,431.00	5,510,641.00	12,816,522.00	1,642,988.00	94.77	100.00	100.00	32.86	20.45%	15.42%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,840,000.00	5,800,000.00	5,160,000.00	2,970,000.00	97.33	96.67	86.00	49.50	0.00%	-13.54%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28,730,000.00	57,320,000.00	31,878,578.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,120,000.00	56,816,500.00	31,740,000.00	9,345,000.00	97.88	99.12	99.57	26.70	16.23%	-3.16%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PengadaanKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Pengadaan Mebel	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318,880,000.00	355,797,748.00	430,340,148.00	385,151,985.00	395,040,000.00	317,224,146.00	337,870,213.00	408,874,870.00	34,136,362.00	99.48	94.96	95.01	8.86	6.15%	-16.03%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	38.67	0.00%	0.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,000,000.00	48,060,148.00	57,060,148.00	28,811,985.00	48,000,000.00	11,375,250.00	30,179,013.00	42,407,430.00	13,186,362.00	87.50	62.79	74.32	45.77	76.38%	34.23%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305,880,000.00	307,737,600.00	373,280,000.00	353,340,000.00	344,040,000.00	305,848,896.00	307,691,200.00	366,467,440.00	19,790,000.00	99.99	99.98	98.17	5.60	3.48%	-18.72%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,047,000.00	57,215,600.00	192,846,148.00	82,476,331.00	107,547,000.00	42,685,400.00	57,198,500.00	177,908,705.00	26,711,500.00	94.76	99.97	92.25	32.39	59.31%	40.01%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,000,000.00	20,797,800.00	47,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	21,985,400.00	19,850,500.00	34,056,085.00	25,211,500.00	99.93	95.45	72.46	45.84	34.39%	8.97%
Pemeliharaan Mebel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,547,000.00	15,547,000.00	15,346,148.00	14,976,331.00	10,547,000.00	8,200,000.00	15,540,000.00	15,268,250.00	1,500,000.00	77.75	99.95	99.49	10.02	3.53%	-0.60%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	20,870,800.00	130,500,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	21,808,000.00	128,584,370.00	0.00	0.00	104.49	98.53	0.00	106.32%	97.41%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	1,000,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-48.00%	-25.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	188,520,000.00	184,992,100.00	363,000,000.00	427,178,586.00	58,049,000.00	176,449,500.00	184,992,000.00	355,731,870.00	96,380,600.00	93.60	100.00	98.00	22.56	6.41%	6.06%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12,000,000.00	13,500,000.00	13,000,000.00	11,600,000.00	15,000,000.00	11,730,000.00	13,500,000.00	13,000,000.00	0.00	97.75	100.00	100.00	0.00	6.83%	-22.15%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,000,000.00	13,500,000.00	13,000,000.00	11,600,000.00	15,000,000.00	11,730,000.00	13,500,000.00	13,000,000.00	0.00	97.75	100.00	100.00	0.00	6.83%	-22.15%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	176,520,000.00	171,492,100.00	350,000,000.00	415,578,586.00	43,049,000.00	164,719,500.00	171,492,000.00	342,731,870.00	96,380,600.00	93.31	100.00	97.92	23.19	7.58%	8.02%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	176,520,000.00	171,492,100.00	350,000,000.00	415,578,586.00	43,049,000.00	164,719,500.00	171,492,000.00	342,731,870.00	96,380,600.00	93.31	100.00	97.92	23.19	7.58%	8.02%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38,500,000.00	43,000,000.00	256,500,000.00	225,823,500.00	155,000,000.00	38,500,000.00	42,918,000.00	253,815,000.00	3,570,000.00	100.00	99.81	98.95	1.58	116.22%	101.07%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0.00	0.00	158,000,000.00	102,900,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	157,675,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00	99.79	3.47	-21.57%	-24.43%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	158,000,000.00	102,900,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	157,675,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00	99.79	3.47	-21.57%	-24.43%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	38,500,000.00	43,000,000.00	98,500,000.00	68,900,000.00	95,000,000.00	38,500,000.00	42,918,000.00	96,140,000.00	0.00	100.00	99.81	97.60	0.00	37.15%	8.87%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	38,500,000.00	43,000,000.00	63,500,000.00	23,900,000.00	50,000,000.00	38,500,000.00	42,918,000.00	63,462,000.00		100.00	99.81	99.94	-	26.55%	-10.16%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	22,678,000.00	0.00	0.00	0.00	90.71	0.00	-5.00%	-25.00%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0.00	0.00	10,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	37.50%	-25.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0.00	0.00	0.00	54,023,500.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.37%	0.00%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0.00	0.00	0.00	12,804,700.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.10%	0.00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0.00	0.00	0.00	10,304,700.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.15%	0.00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0.00	0.00	0.00	10,304,700.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.15%	0.00%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0.00	0.00	0.00	10,304,700.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.15%	0.00%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00	10,304,700.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.15%	0.00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,410,000.00	25,539,000.00	56,815,000.00	52,109,400.00	45,000,000.00	0.00	25,539,000.00	57,006,000.00	5,100,000.00	0.00	100.00	100.34	9.79	144.91%	8.04%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0.00	25,539,000.00	51,305,000.00	47,109,400.00	40,000,000.00	0.00	25,539,000.00	51,566,000.00	5,100,000.00	0.00	100.00	100.51	10.83	19.40%	2.95%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0.00	8,670,000.00	6,655,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	8,670,000.00	66,550,000.00	5,100,000.00	0.00	100.00	1000.00	25.50	44.32%	143.81%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0.00	16,869,000.00	44,650,000.00	27,109,400.00	20,000,000.00	0.00	16,869,000.00	44,616,000.00	0.00	0.00	100.00	99.92	0.00	24.79%	16.12%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,410,000.00	0.00	5,510,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	441,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	10.00	0.00	98.73	0.00	-27.31%	-50.00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,410,000.00	0.00	5,510,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	441,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	10.00	0.00	98.73	0.00	-27.31%	-50.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47,737,000.00	64,661,000.00	327,474,686.00	138,774,000.00	115,000,000.00	39,947,000.00	64,291,100.00	106,947,000.00	25,250,000.00	83.68	99.43	32.66	18.20	91.79%	12.72%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47,737,000.00	64,661,000.00	327,474,686.00	138,774,000.00	115,000,000.00	39,947,000.00	64,291,100.00	106,947,000.00	25,250,000.00	83.68	99.43	32.66	18.20	91.79%	12.72%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-25.00%	-25.00%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0.00	20,486,200.00	30,737,000.00	77,625,000.00	50,000,000.00	0.00	20,486,200.00	30,722,000.00	11,250,000.00	0.00	100.00	99.95	14.49	41.75%	-3.35%
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	34,000,000.00	13,350,000.00	51,737,686.00	30,149,000.00	30,000,000.00	26,210,000.00	13,250,000.00	51,725,000.00	0.00	77.09	99.25	99.98	0.00	46.15%	35.23%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0.00	30,824,800.00	245,000,000.00	31,000,000.00	35,000,000.00	0.00	30,554,900.00	24,500,000.00	14,000,000.00	0.00	99.12	10.00	45.16	155.09%	-15.67%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,000,000.00	45,117,802.00	121,450,000.00	60,000,000.00	79,000,000.00	23,230,000.00	44,598,600.00	118,207,000.00	2,550,000.00	92.92	98.85	97.33	4.25	57.68%	39.80%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,000,000.00	45,117,802.00	121,450,000.00	60,000,000.00	79,000,000.00	23,230,000.00	44,598,600.00	118,207,000.00	2,550,000.00	92.92	98.85	97.33	4.25	57.68%	39.80%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0.00	3,009,800.00	83,630,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	3,009,600.00	83,615,000.00	0.00	0.00	99.99	99.98	0.00	647.64%	644.57%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0.00	10,110,002.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,110,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-25.00%	-25.00%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25,000,000.00	31,998,000.00	37,520,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	23,230,000.00	31,479,000.00	34,262,000.00	50,000,000.00	92.92	98.38	91.32	100.00	27.13%	22.57%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Pangalengan dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan cukup baik dengan capaian keuangan yang pada umumnya tinggi. Berdasarkan evaluasi perlunya adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar serapan keuangan dapat lebih berbanding lurus dengan capaian kinerja nyata di lapangan.

Faktor pendorong utama keberhasilan ini antara lain adanya komitmen aparatur, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta respons masyarakat yang relatif baik terhadap pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi, serta kendala dalam pengendalian dan *monitoring* program. Oleh karena itu, meskipun kinerja Kecamatan Pangalengan telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan publik masih perlu terus dilakukan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Kelompok sasaran kecamatan adalah target utama yang akan dilayani atau dilibatkan dalam Pembangunan dan kegiatan di tingkat kecamatan, agar program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangalengan, maka yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Pangalengan antara lain sebagai berikut:

a. Masyarakat umum

   Kelompok Masyarakat ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, perizinan dan non-perizinan, pertanahan, sosial, pendidikan, kesehatan, layanan informasi, konsultasi dan pengaduan publik.

b. Pemerintah Desa

   Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta

fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah

c. Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran pelayanan ini diwujudkan melalui peran strategis sebagai fasilitator, sekaligus penghubung antara pemerintah kabupaten dengan desa/keluarahan. Kecamatan memberikan dukungan kepada OPD dalam bentuk penyediaan data dan informasi wilayah, fasilitasi pelaksanaan program, serta penyusunan laporan perkembangan pembangunan pelayanan publik. Selain itu, kecamatan juga berperan dalam mengkoordinasikan usulan Musrenbang agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, memberikan rekomendasi administratif, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lapangan.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pangalengan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

2.1.5 Mitra Kecamatan Pangalengan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pangalengan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Kecamatan Pangalengan berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara masyarakat dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan teknis. Kehadiran mitra ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat efektivitas program, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mitra Kecamatan Pangalengan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten (Dinas dan Badan)

   Sesuai dengan peta relasi dalam pro bisnis, kecamatan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan seluruh dinas dan badan di tingkat kabupaten dalam upaya melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui fasilitasi dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

   Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan, Kecamatan menjalin kemitraan dengan desa guna penyampaian informasi terhadap masyarakat dan selain itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat melaksanakan tugas atributif untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan

koordinasi terhadap Pemerintah Desa, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan dan Forum Masyarakat
   Kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan forum masyarakat seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), karang taruna, dan PKK, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
   BPD berperan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus menjadi mitra kecamatan dalam menjaring dan mengawal aspirasi masyarakat tingkat desa.
5. Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi Lokal
   Dunia usaha, koperasi, dan UMKM merupakan mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan ekonomi masyarakat, diantaranya bekerjasama dengan *Star Enery* dan PTPN dalam menurunkan angka *stunting* dengan cara berkontribusi dalam Pemberian Makan Tambahan (PMT) kepada Balita yang beresiko *stunting* dan Ibu Hamil KEK selama 4 bulan, *Star Energy* juga memberikan bantual CSR Fisik dengan membangun septic tank komunal di 8 Desa yang berada di Kecamatan Pangalengan.
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda
   Keterlibatan para tokoh lokal penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat nilai-nilai lokal dalam pembangunan wilayah.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah
   Berperan dalam mendukung program pemberdayaan, advokasi sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat, diantaranya Kecamatan Pangalengan berkerjsama dengan Yayasan Care dalam menurunkan angka *stunting* dengan cara berkontribusi dalam Pemberian Makanan Tamabahan (PMT) kepada Balita dan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) selama 4 bulan.
8. Aparat Keamanan (Polsek dan Koramil)
   Dalam konteks ketentraman dan ketertiban umum, kecamatan juga bermitra dengan aparat keamanan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara kondusif.

9. Akademisi

Kecamatan Pangalengan bekerjasama dengan Akademisi diantaranya bekerjasama dengan beberapa Universitas yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan memberikan Penyuluhan kepada masyarakat khususnya remaja dan orang tua tentang dampak Pernikahan Dini, kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka *stunting* di Kecamatan Pangalengan, serta bekerjasama dengan *Telkom University* dalam pembuatan Aplikasi "*Rumah Stunting"* untuk memetakan sebaran data *stunting* supaya intervensi *stunting* tepat sasaran.

Dengan adanya kolaborasi bersama mitra-mitra tersebut, pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pangalengan dapat berlangsung lebih terpadu, efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pangalengan

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional selama 5 tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis serta program tahunan. RPJMN 2025–2029 disusun dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sehingga setiap arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah agar daerah dapat menyusun perencanaan yang konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan target nasional.

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup

langkah- langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat arah, prioritas, dan target pembangunan Indonesia dalam jangka menengah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Analisis terhadap RPJMN ini penting untuk memastikan bahwa permasalahan pelayanan yang diidentifikasi di tingkat kecamatan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Pangalengan dapat dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan lokal secara tepat.

Dalam mewujudkan transformasi digital, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, hukum berkeadilan, keamanan nasional, stabilitas ekonomi mikro serta regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, pemerintah menetapkan salah satu prioritas nasional yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Isu, sasaran dan arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan dijabarkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan
RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi

No	Isu Nasional	Sasaran Nasional	Arah Kebijakan
1	Keterpaduan antara layanan publik belum optimal	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
	Akses pelayanan publik belum memadai		
	Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif		

Sumber Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD dirancang untuk menyusun kebijakan yang holistrik, tematik, integrative dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, serta kearifan lokal guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah. RPJMD juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD kedalam program dan kegiatan yang terukur dalam jangka menengah.

Sebagai bagian Integral dari Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di wilayah, selalu mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung yang berangkat dari potensi dan kondisi yang ada.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) , Maju, Dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas”. penjabaran dari Visi Kabupaten Bandung tersebut 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwarsikan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warka Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju, memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan Masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator ytertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata Provinsi dan nasional.

3.Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan, Memiliki arti yaitu Pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikamti oleh Masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misia Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada misi nomor 3 yaitu: mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transfaran dan akuntabel;

Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3 *Cascading* Misi Pembangunan 3



Sumber: RPJMD 2025-2029 Hasil Analisi Bapperida, 2025.

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029 menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan, RPJMD Kabupaten Bandung menekankan pada percepatan Pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas dengan fokus pada Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap bencana, Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia, Penguatan Ekonomi Inklusif dan pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan daerah, Peningkatan Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan serta Penguatan Ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang dan tata guna lahan secara terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bandung termasuk Kecamatan Pangalengan. Rencana tata ruang wilayah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan daerah secara terpadu, seimbang, dan berwawasan lingkungan.

Telaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan publik. Dengan membandingkan struktur dan pola ruang eksisting, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, serta prioritas wilayah pelayanan di Kecamatan Pangalengan untuk lima tahun mendatang. Selanjutnya, dengan mengacu pada indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, pemerintah dapat menyusun rancangan program pembangunan beserta targetnya agar selaras dengan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044, pada Bab V diamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah PKL, PKLp, dan PPK. Sesuai arahan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044, rencana tata ruang wilayah yang berkaitan dengan Kecamatan Pangalengan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pangalengan terletak di wilayah Bandung Selatan dengan kondisi topografi pegunungan dan iklim sejuk, yang berfungsi sebagai salah satu kawasan strategis dalam bidang pertanian, pariwisata, serta energi terbarukan.
2. Kecamatan Pangalengan termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berperan penting dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
3. Kecamatan Pangalengan termasuk kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan perkebunan, serta kawasan pertanian pangan dan hortikultura yang menjadi penopang utama ketahanan pangan, konservasi lingkungan, serta pengembangan pariwisata berbasis alam.
4. Kecamatan Pangalengan memiliki fungsi strategis sebagai:
   a. Kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan (sapi perah dan komoditas hortikultura unggulan)
   b. Kawasan pariwisata alam, ekowisata, dan agrowisata (Perkebunan Teh Malabar, Situ Cileunca, dan destinasi wisata berbasis alam lainnya)

Kawasan energi terbarukan, khususnya panas bumi (geothermal) dan mikrohidro

c. Kawasan pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
d. Pusat permukiman perdesaan dengan dukungan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik
e. Kawasan konservasi hutan dan sumber daya air yang berfungsi untuk mitigasi bencana dan pengendalian lingkungan
f. Kawasan pengembangan perikanan air tawar serta budidaya berbasis waduk dan sungai

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.11 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber : KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Pangalengan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Pangalengan berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Pangalengan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dalam melaksanakan fugas pokok dan fungsi kecamatan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian pelayanan kepada masyarakat. Tugas, pokok dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kecamatan yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat baik berkaitan dengan pelayanan, tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu :

1. Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan berdaya saing

   Sebagian pegawai belum memiliki kemampuan yang merata dalam menguasai teknologi informasi, pelayanan publik berbasis digital, maupun manajemen administrasi pemerintahan. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum optimal

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, pelaksanaannya belum optimal dilihat dari beberapa aspek yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan kinerja serta evaluasi kinerja. Hal itu terjadi karena kapasitas aparatur kecamatan dalam memahami konsep manajemen kinerja masih terbatas, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung SAKIP belum maksimal, pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah belum intensif, dan budaya kerja aparatur masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, bukan hasil.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai
   Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, serta aktivitas masyarakat di wilayah kecamatan. Hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, minimnya dukungan teknologi dalam pelayanan publik, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait pembangunan sarana dan prasarana masih belum optimal.
4. Masih terdapat wilayah rawan sosial dan ekonomi
   Masih terdapat wilayah rawan sosial ekonomi menunjukan bahwa belum semua masyarakat di Kecamatan Pangalengan dapat merasakan hasil pembangunan secara merata. Kondisi ini tercermin dengan masih adanya masyarakat miskin ekstrim sehingga berpengaruh pada tingkat prevalensi stunting pada anak-anak.
5. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan
   Kecamatan memiliki fungsi utama sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pendayagunaan potensi wilayah belum dapat dilakukan secara optimal karena adanya keterbatasan kewenangan. Penyebabnya adalah regulasi yang membatasi kewenangan kecamatan, sehingga lebih berperan sebagai pelaksana administratif dan kolaboratif, dan keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, dan fasilitas) yang dimilki kecamatan untuk menggali dan mengelola potensi wilayah,serta belum optimalnya sinergi antara

kecamatan dengan perangkat daerah teknis serta mitra pembangunan lainnya.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa

   Tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada kondisi saat ini tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena beberapa aspek diantaranya Kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik masih terbatas, Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan terhadap desa belum optimal.

7. Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan liar

   Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan sampah terpadu, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanaan publik kecamatan belum optimal	Belum optimalnya sumber daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.	Keterbatasan kemampuan SDM
			Jumlah aparatur terbatas
			Kompetensi teknis dan manajerial belum merata
			Terbatasnya pelatihan dan bimbingan teknis untuk aparatur
		Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang belum optimal	kapasitas aparatur kecamatan dalam memahami konsep manajemen kinerja masih terbatas
			pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung SAKIP belum maksimal
			pendampingan dan koordinasi dengan peranglat daearh belum intensif
			budaya kerja aparatur masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, bukan hasil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai	Keterbatasan anggaran dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
			Minimnya dukungan teknologi dalam pelayanan publik
			Koordinasi dengan perangkat daerah terkait pembangunan sarana dan prasarana masih belum optimal
		Masih terdapat wilayah yang rawan sosial dan ekonomi	Masih adanya masyarakat yang miskin ekstrim
			Fasilitas kesehatan dan sarana sanitasi belum memadai
			Masih tingginya prevalensi stunting pada anak-anak
			Rendahnya produktivitas dan keterampilan masyarakat
			UMKM belum terorganisir dengan baik
		Belum Optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan	Regulasi yang membatasi kewenangan kecamatan, sehingga lebih berperan sebagai pelaksana administratif dan kolaboratif
			Keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, dan fasilitas) yang dimilki kecamatan untuk menggali dan mengelola potensi wilayah
			Belum optimalnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah teknis serta mitra pembangunan lainnya
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik masih terbatas
			Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan terhadap desa belum optimal
		Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Kurangnya pengelolaan sampah terpadu
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya
			Pemanfaatan sumber air pegunungan belum optimal
			Alih fungsi lahan perkebunan menjadi tempat wisata

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pangalegan, 2025.

2.2.6 Isu Strategis

Penyusunan isu strategis dalam Rencana Strategis 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi Pembangunan. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan dan program Pembangunan. Faktor internal meliputi potensi dan permasalahan pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata Kelola pemerintahan, sedangkkan faktor eksternal mencakup kebijakan nasional, dinamika global, serta perkembangan sosial dan ekonomi di Tingkat regional.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung terdapat isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu di dalamnya mencakup :

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana;
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing SDM;
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan pengembangan Wilayah;
6. Transformasi Tata Kelola Pemerinatah; dan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan tersebut terdapat isu-isu strategis sesuai tugads dan fungsi Kecamatan Pangalengan Kabupaten bandung mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Bandung yang ke 6 yaitu “Transformasi Tata kelola Pemerintahan”. Rumusan ini didasarkan pada kebutuhan memperkuat kapasitas birokrasi agar lebih adaptif, kolaboratif, dan digital, serta mengoptimalkan Tata kelola Pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transfaran, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, isu Strategis Kecamatan Pangalengan dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pangalengan

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pelayanan publik tingkat dasar, dan daerah pertanian, peternakan dan perkebunan	Belum optimalnya sumber daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Transformasi digital	Bonus demografi	Kualitas dan daya saing SDM	Optimalisasi kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Transformasi digital	Desentralisasi dan ekonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi digital	Desentralisasi dan ekonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Masih terdapat wilayah yang rawan sosial dan ekonomi	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	Krisis pangan global	Ketahanan pangan	Ketahanan pangan daerah	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan wilayah
	Belum Optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara efektif dan efisien.
	Belum pptimalnya tata kelola pemerintahan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerinatahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
	Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lingkungan serta ketahanan bencana	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana alam

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Pangalengan, 2025.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

Isu strategis 1: Optimalisasi kualitas Sumber Daya Manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Isu muncul dari fakta karena masih terdapat aparatur yang kompetensinya terbatas, keterampilan digital belum merata, dan budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi pelayanan, sehingga pelayanan publik kurang optimal. Dengan demikian, isu strategis Kecamatan Pangalengan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan etika pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberian *reward and punishment*.

Isu strategis 2: Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Isu ini muncul karena pada SAKIP Kecamatan Pangalengan masih terdapat kekurangan/kelemahan baik dari segi perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, pemanfaatan, dan evaluasi kinerja.

Sehingga, peningkatan kualitas SAKIP pada Kecamatan Pangalengan perlu dilakukan dengan cara penguatan pemahaman aparatur mengenai SAKIP, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, konsisitensi monitoring dan evaluasi, serta integrasi sistem informasi kinerja.

Isu strategis 3: Peningkatan kualitas pelayanan publik

Isu tersebut muncul karena standar pelayanan belum sepenuhnya diterapkan, sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas, dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan masih lemah.

Untuk itu, penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, modernisasi layanan berbasis digital, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif harus dilaksanakan.

Isu stratgis 4: Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan wilayah

Isu tersebut muncul karena masih banyak masyarakat yang belum berdaya secara ekonomi, ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan akses sumber pangan belum merata, sehingga masih terdapat angka prevalensi stunting pada anak-anak dan kelompok masyarakat miskin ekstrim. Perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal (UMKM, pertanian, peternakan) fasilitasi akses permodalan, pembentukan lumbung pangan desa, serta pelatihan kewirausahaan.

Isu strategis 5: Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur untuk mendukung pelimpahan kewenangan secara efektif dan efisien.

Isu tersebut muncul karena pelimpahan kewenangan sepenuhnya dilimpahkan kepada Kecamatan, sehingga akan menyebabkan terganggunya pelayanan

publik, potensi konflik dan sengketa, penurunan efektivitas organisasi, serta ketidakjelasan tanggung jawab.

Untuk itu, dengan keterbatasan pelimpahan kewenangan, Kecamatan Pangalengan akan melakukan berbagai hal seperti memperkuat fungsi koordinasi antar lembaga dan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, menyelenggarakan pelayanan administrasi yang dilimpahkan, mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah daerah, serta melakukan pemberdayaan masyarakat.

Isu strategis 6: Peningkatan tata kelola pemerintahan desa

Isu tersebut muncul karena masih adanya desa yang tata kelola pemerintahannya belum transfaran, akuntabel, dan partisipatif, lemahnya aparatur desa, serta pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan masih belum maksimal.

Untuk itu, penguatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan terhadap desa baik itu manajerial maupun pengelolaan keuangan akan dilaksanakan secara berkesinambungan, pelatihan aparatur desa, implementasi sistem informasi desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan ditingkatkan.

Isu strategis 7: Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana alam

Isu tersebut muncul karena permasalahan sampah liar serta risiko bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung menjadi tantangan bagi Kecamatan Pangalengan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, baik air dan udara tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi.

Untuk itu, diperlukan peningkatan penganan permasalahan sampah, penerapan pola hidup sehat, dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta stakeholder terkait. Selain itu, pengendalian risiko bencana perlu diperkuat dengan upaya mitigasi, pemetaan wilayah rawan bencana serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berahlak Serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah Dan pelayanan publik yang Partisipatis, Transparan dan Akuntabel;

4. Meningkatkan Kualitas Infrastuktur yang terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Pangalengan menetapkan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan berdasrkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati. Kecamatan Pangalengan berpedoman pada Misi Ke 3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Tranparan dan Akuntabel. Dengan Tujuan RPJMD Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Kecamatan Pangalengan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Indikator Laju IKM”

3.1.2 Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Pembangunan Kecamatan Pangalengan Tahun 2025– 2029 diarahkan pada upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, Kecamatan Pangalengan merumuskan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” sebagai fokus pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. asaran ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus menjadi pijakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pangalengan, yaitu:

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan”

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pangalengan pada periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan

SASARAN RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju IKM	0,19%	0.22%	0.24%	0.25%	0.26%	0.27%	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	85.05 Poin	85.24 Point	85.44 Point	85.65 Point	85.87 Point	86.10 Point	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Pangalengan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Pangalengan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Pangalengan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan. Penahapan Renstra Kecamatan Pangalngan dapat disajikan seperti pada Tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Pangalengan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

Tahap I – Tahun 2026 :

Tahun 2026 merupakan tahap pertama atau fase awal yang menitikberatkan pada penguatan pondasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan mekanisme pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemetaan kondisi, permasalahan dan potensi desa yang menjadi basis data untuk peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya pondasi yang kuat pada tahap awal ini, diharapkan Kecamatan Pangalengan mampu membangun sistem pelayanan yang efektif sekaligus menyiapkan dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Tahap II – Tahun 2027:

Pada tahap kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik terus dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari penguatan pondasi di tahap awal. Upaya ini diiringi dengan langkah strategis membangun sistem pelayanan berbasis digital secara bertahap, sehingga pelayanan publik mulai bertransformasi menuju model yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat, fokus diarahkan untuk mendorong munculnya inovasi lokal yang didasarkan pada hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Dengan demikan, tahap ini menjadi titik awal menuju pelayanan berbasis digital dan masyarakat desa yang lebih berdaya dan inovatif.

Tahap III – Tahun 2028:

Memasuki tahap ketiga, menjadi fase transformasi dimana fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital secara lebih luas. Aparatur kecamatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital, sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang lebih produktif melalui inovasi yang berkelanjutan serta penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat. Dengan demikian, tahap ketiga diharapkan terjadi percepatan dalam pencapaian pelayanan publik

yang lebih berkualitas dan berorientasi digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat desa yang semakin berdaya, kreatif, dan memiliki keunggulan kompetitif melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap IV – Tahun 2029:

Tahap keempat merupakan fase pematangan, dimana fokus diarahkan pada penguatan implementasi pelayanan publik berbasis digital yang telah berjalan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan yang semakin konsisten dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal semakin diperkokoh melalui inovasi dan kolaborasi yang semakin erat, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan.

Dengan demikian, tahap ini bukan hanya memperkuat kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Tahap V – Tahun 2030:

Tahun 2030 merupakan tahap akhir dari periode Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029, dimana tahap ini menjadi fase keberlanjutan. Pada tahap ini, pelayanan publik digital diproyeksikan sudah berjalan secara utuh, konsisten dan berkesinambungan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dengan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana, dan inovasi pelayanan dikembangkan menjadi sistem yang berkelanjutan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing wilayah. Tahap ini menjadi puncak dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilalui selama lima tahun, sekaligus pintu gerbang untuk melanjutkan Pembangunan.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pangalengan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029

Berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung 2025– 2029 dan operasionalisasi NSPK, Kecamatan Pangalengan menyusun arah kebijakan Renstra yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan peningkatan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan

Berikut ini disajikan tabel 3.3 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pangalengan

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pangalengan

No	Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung merupakan program yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator keluaran program yang diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Bandung sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Bandung. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Kecamatan Pangalengan selama periode 2024-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Pangalengan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju IKM		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai IKM		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah oleh Tim Evaluator Indeks Reformasi Birokrasi -Hasil penilaian evaluasi Manajemen Resiko oleh Inspektorat
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksanaya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(jumlah administrasi BMD yang terkelola dengan baik/jumlah administrasi BMD)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah			Persentase Pelasanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah Kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan / koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan uang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib	Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah			Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Terlaksananya Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
				Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan kapasitasnya
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananyua Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase Desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

Tabel 4.2

Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
KECAMATAN				6.211.714.984		5.891.990.800		6.082.430.000		6.178.801.450		6.545.682.130	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		1.61.00 2. 40.30	5.130.518.800	1. 61.50 2. 40.40	5.057.747.000	1. 62.00 2. 40.50	5.057.747.000	1. 62.50 2. 40.60	5.057.747.000	1. 63.00 2. 40.70	5.057.747.000	S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	75,30	77,50	48.600.000	79,00	42.000.000	79,50	42.000.000	80,50	42.000.000	81,00	42.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000	2 Dokumen	3.400.000	2 Dokumen	3.400.000	2 Dokumen	3.400.000	2 Dokumen	3.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	35.000.000	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	25.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	50 Data	1.700.000	50 Data	1.700.000	50 Data	1.700.000	50 Data	1.700.000	50 Data	1.700.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	4.401.360.000	100%	4.404.760.000	100%	4.404.760.000	100%	4.404.760.000	100%	4.404.760.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 org/Bln	21 org/Bln	4.397.960.000	21 org/Bln	4.397.960.000	21 org/Bln	4.397.960.000	21 org/Bln	4.397.960.000	21 org/Bln	4.397.960.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.700.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	4 Laporan	3.400.000	4 Laporan	3.400.000	4 Laporan	3.400.000	4 Laporan	3.400.000	4 Laporan	3.400.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	100%	1.700.000	100%	3.400.000	100%	3.400.000	100%	3.400.000	100%	3.400.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	1700000	0 Laporan	1.700.000	0 Laporan	1.700.000	0 Laporan	1.700.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.700.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 pegawai	0 pegawai	-	0 pegawai	-	0 pegawai	-	0 pegawai	-	0 pegawai	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	125.518.800	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	70.518.800	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	1.000.000	0 Unit	1.000.000	0 Unit	1.000.000	0 Unit	1.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	1.000.000	0 Unit	1.000.000	0 Unit	1.000.000	0 Unit	1.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	2.000.000	0 Paket	2.000.000	0 Paket	2.000.000	0 Paket	2.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	1.000.000	0 Paket	1.000.000	0 Paket	1.000.000	0 Paket	1.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			428.340.000		395.040.000		395.040.000		395.040.000		395.040.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	377.340.000	12 Laporan	344.040.000	12 Laporan	344.040.000	12 Laporan	344.040.000	12 Laporan	344.040.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	97.80 %	98.00 %	110.000.000	98.20 %	107.547.000	98.40 %	107.547.000	98.60 %%	107.547.000	98.80 %	107.547.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Kend	13 Kend	55.000.000	13 Kend	55.000.000	13 Kend	55.000.000	13 Kend	55.000.000	13 Kend	55.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Mebel	0 Mebel	-	0 Mebel	1.000.000	0 Mebel	1.000.000	0 Mebel	1.000.000	0 Mebel	1.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	15.000.000	6 Unit	10.547.000	6 Unit	10.547.000	6 Unit	10.547.000	6 Unit	10.547.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	40.000.000	2 Gedung	40.000.000	2 Gedung	40.000.000	2 Gedung	40.000.000	2 Gedung	40.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Gedung	0 Gedung	-	0 Gedung	1.000.000	0 Gedung	1.000.000	0 Gedung	1.000.000	0 Gedung	1.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100%	100%	490.866.184	100%	320.243.800	100%	631.683.000	100%	627.054.450	100%	1.094.935.130	S 3.1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yangAda di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			-		-							
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	475.866.184	100%	305.243.800	100%	616.683.000	100%	612.054.450	100%	1.079.935.130	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	475.866.184	12 Laporan	305.243.800	12 Laporan	616.683.000	12 Laporan	612.054.450	12 Laporan	1.079.935.130	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	325.330.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	S 3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	122.380.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	122.380.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di tingkatkan kapasitasnya	1 Lemb	1 Lemb	95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lemb	0 Lemb	-	0 Lemb	-	0 Lemb	-	0 Lemb	-	0 Lemb	-	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lemb	1 Lemb	50.000.000	1 Lemb	50.000.000	1 Lemb	50.000.000	1 Lemb	50.000.000	1 Lemb	50.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Lemb	0 Lemb	-	0 Lemb	-	0 Lemb	-	0 Lemb	-	0 Lemb	-	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi	100%	100%	107.950.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	21.590.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluaga	50 Keluaga	21.590.000	50 Keluaga	2.000.000	50 Keluaga	2.000.000	50 Keluaga	2.000.000	50 Keluaga	2.000.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluaga	50 Keluaga	21.590.000	50 Keluaga	2.000.000	50 Keluaga	2.000.000	50 Keluaga	2.000.000	50 Keluaga	2.000.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan PengembanganEkonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan PengembanganEkonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga	21.590.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	50 Keluarga	21.590.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	50 Keluarga	2.000.000	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	45.000.000	100,00	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100,00	100,00	145.000.000	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	S 3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai PenugasanKepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			145.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 orang	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	50 orang	80.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 orang	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(08)*	*(10)*	*(12)*	*(14)*	*(16)*	*(18)*	*(20)*	*(22)*
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100,00	100,00	75.000.000	100,00	199.000.000	100,00	78.000.000	100,00	179.000.000	100,00	78.000.000	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina			75.000.000		199.000.000		78.000.000		179.000.000		78.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	121.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	101.000.000	1 Dokumen	-	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	1.000.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pangalengan, 2025.

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

4.2 Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan merumuskan program-program pembangunan daerah dengan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam periode masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Bandung menetapkan 13 prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Kecamatan Pangalengan, sebagai perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung, berkontribusi pada pelaksanaan misi 3 yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Dukungan tersebut diwujudkan melalui prioritas pembangunan daerah diantaranya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik. Adapun daftar subkegiatan prioritas Kecamatan Pangalengan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan tahun 2025-2029 dirumuskan secara sistematis melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Penyusunan IKU dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja yang mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), guna memastikan bahwa setiap indikator mampu mencerminkan pencapaian pembangunan secara objektif dan akuntabel. IKU tidak hanya menjadi alat ukur pencapaian tujuan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja Kecamatan Pangalengan pada akhir periode perencanaan.

Penetapan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan Renstra di tingkat kecamatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pangalengan Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada struktur tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung sebagaimana terlihat pada penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangalengan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.19 %	0.22 %	0.24 %	0.25 %	0.26 %	0.27 %	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

Penetapan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai IKU dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam menilai kinerja pelayanan publik. IKM mencakup berbagai aspek layanan, antara lain kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan prosedur, serta kepastian biaya dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, laju peningkatan nilai IKM menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pelayanan publik Kecamatan Pangalengan memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Pada Tingkat Kecamatan terdapat tantangan signifikan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. IKK ini menyebabkan terarahnya Tujuan Kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, serta kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap Masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pangalengan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.19 %	0.22 %	0.24 %	0.25 %	0.26 %	0.27 %	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pangalengan, 2025

Sebagai IKK, Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak hanya mencerminkan hasil dari proses pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas implementasi strategi peningkatan kualitas layanan. Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggambarkan sejauh mana layanan yang disediakan memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi ketepatan waktu, kemudahan prosedur, kualitas interaksi petugas, hingga kepuasan secara keseluruhan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Kecamatan ini disusun sebagai dokumen awal perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, termasuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Penyusunan Renstra Kecamatan juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya dokumen ini, Kecamatan diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, Rancangan Akhir Renstra ini akan menjadi bahan pembahasan dalam forum Diskusi maupun konsultasi guna memperoleh masukan untuk menyempurnakan dokumen sebelum ditetapkan sebagai Rancangan Akhir Renstra Kecamatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 - 2029 merupakan Pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pangalengan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergi dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2025 - 2029. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Pangalengan 2025 - 2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.
2. Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 - 2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan (Renja Kecamatan Pangalengan) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan Akhir APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Rentra Kecamatan Pangalengan harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pangalengan (RKA – DPA Kecamatan Pangalengan).
4. Apabila ada kebijaksanaan Panganggaran untuk Kecamatan Pangalengan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan / perbaikan.

Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025 - 2029 yang tercermin dari Renja-PD Kecamatan Pangalengan, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP). Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Aparatur Kecamatan Pangalengan dalam rangka melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, Program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat Tangguh Adaftif, Inovatif, dan Kreatif. Menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Soreang, September 2025

CAMAT PANGALENGAN

Ttd.

VENA ANDRIAWAN

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Data Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....25
Tabel 2.2 Data Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025.....25
Tabel 2.3 Data Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan: Tahun 2025.....25
Tabel 2.4 Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pangalengan yang telah mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon.....25
Tabel 2.5 Hasil Rekonsilisasi Aset Triwulan II Tahun 2025.....26
Tabel 2.6 Tabel Kewenangan yang dilimpahkan Kepada Kecamatan....34
Tabel 2.7 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026.....38
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.....40
Tabel 2.9 Pencapaian Anggaran sebagai kinerja pelayanan Kecamatan Pangalengan.....47
Tabel 2.10 Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi...60
Tabel 2.11 Telaahan RTRW dan KLHS Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.....64
Tabel 2.12 Pemetaan Masalah.....67
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pangalengan.....70
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangalengan.....75
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pangalengan.....76
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pangalengan.....79
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Pangalengan.....81
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan.....92

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....104
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangalengan.....106
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pangalengan.....106

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pangalengan.....20
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Pangalengan.....28
Gambar 2.3 *Casecading* Misi Pembangunan 3.....62